

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Atmosudirjo, S. Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Basah, Sjachran, 1989, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Basah, Sjachran, 2014, *Eksistensi Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Darumurti, Khrisna Djaya, 2016, *Diskresi Kajian: Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Djamiati, Sri Tatiek, 2020, *Hukum Administrasi Sebuah Bunga Rampai*, Laksbang Justitia, Yogyakarta.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hafidz Arsyad, H. Jawade, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2021, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2015, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” – Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Huisman, R.J.H.M, 1995, *Algemeen Bestuursrecht: Een Inleiding*, Kobra, Amsterdam.

Indroharto 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta.

_____, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Kumalaningdyah, Nur, “Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 26 September 2019.

Latief, Abdul, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*, Prenanda, Jakarta.

Lotulung, Paulus Effendie, 1993, *Beberapa Sistem Tetang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah; (Edisi ke-II Dengan Revisi)* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Hadjon, Philipus *et.al*, 2019, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

M. Hadjon, Philipus, 1993, *Pemerintahan Menurut Hukum*, Yuridika, Jakarta.

M. Hadjon, Philipus, Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink, dan J.B.J.M Ten Berge, 2012, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

M. Hadjon, Phillipus, 1980, *Tindakan Pemerintah: (Bestuurhandelling) Pengertian-Pengertian Dasar*, Djumali, Surabaya.

Marbun, S.F., 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

_____, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.

_____, 2018, *Hukum Administrasi Negara I*, UII Press, Yogyakarta.

Marzuki, Laica, “Menyoal Diskresi yang Terpasung (Mengkritisi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)”, *Jurnal Amanna Gappa*, Volume 25 Nomor 2 September 2017.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

- _____, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi, 2003, *Pengkajian Tentang Asas-Asas Pidana Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- _____, 2016, *Implementasi Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, P.T Alumni Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.
- Mustafa, Bachan, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Citra Aditya, Bandung.
- Nur Dewanta, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pramono, Nindyo, 2013, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*, Genta Press, Yogyakarta.
- Priyo Gunarto, Marcus, 2007, *Perkembangan Unsur Delik Korupsi*, Marginal Press, Yogyakarta.
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2014, *Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah*, UII Press, Yogyakarta.
- Sapardjaja, Komariyah Emong, 2013, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Saputra, M. Nata, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Seno Adji, Indriyanto, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit Media.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1993, *Peradilan Tata Usaha Negara*. PT. Eresco, Bandung

- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Suhariyanto, Budi dan Dani Elpah, 2017, *Titik Singgung Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Aspek Hukum Pidana dan Administrasi*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW., 2019, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Tjandra, W. Riawan, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Utrecht, E., 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Retorative Justice*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Wijoyo, Suparto, 1997, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Wiratno, 2009, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung.
- Yulikhan, Eri, 2016, *Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi Dalam PTUN)*, Deepulish, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 387) Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

C. Karya Ilmiah

Alhumami, Khunaifi, 2007, "Perubahan Status Jaksa Agung dan Struktur Organisasi Kejaksaan Serta Pengaruhnya pada Pelaksanaan Penegakan Hukum", *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

- Ansori, Lutfil, “Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” *Jurnal Yuridis* Vol. 2, No. 1 Juni 2015.
- Atho Mudzhar, Muhammad, Muhammad Amin Suma, dkk, “Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)” *Cita Hukum*, Vol. 3 No. 1 Juni 2015.
- Azkia, Ashfa, 2021, “Problematisa Hukum Pemberian Diskresi Pada Lembaga Yudikatif”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Guslan, Odie Faiz, “Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 4, No 1, September 2018.
- Indarti, Erlyn, *Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Semarang, Pidato Pengukuhan yang Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Joennaini Koenti, Ishviati, 2016, “Integritas Kepala Daerah Dalam Penerapan Diskresi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Kerangka *Good Governance*”, *Disertasi*, Program Studi Doktorat Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Julian Noor, Hendry, “Fiktif Positif dan Diskresi Pasca UU Cipta Kerja, dikutip dari Kompas, Selasa 6 April 2021.
- Lukman, Marcus, 1996, “Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Materi Hukum Tertulis Nasional”, *Disertasi*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Lukman, Marcus, 1996, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, *Disertasi*, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Novriadi, Herly, 2019, “Diskresi Kewenangan Pejabat Pemerintahan dan Konsekuensi Yuridis Tata Ruang Pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) di Kota Palembang”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Yogyakarta.

- Nugraha, Satria, "Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palangka Raya, Volume 8 Nomor 1, Maret 2016.
- Nugraha, Muhamad Yodi, "Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa guna Meminimalisir dampak *primum Remedium* dalam Pemidanaan", Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, Vol 6 No. 1 Juni 2020.
- Nurmayani, Mery Farida, "Problematika Konsep Diskresi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (*The Problems of the Discretionary Concept in The Implementation of Government Administration After the Job Creation Law*)", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)* Vol. 1 No 1 Juli 2021.
- Rahman, Faiz, dan Dian Agung Wicaksono, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.
- Rahmawati, Nur Ainiyah, Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* atau *Primum Remedium*", *Recidive*, Vol. 2 No. 1 Januari 2013.
- Rini, Nicken Sarwo, "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (*Abuse of Administrative Powers In Corruption Crime Laws*)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 2, Juni 2018.
- Rokhim, Abdul, "Kewenangan Pemerintah dalam Konteks Negara Kesejahteraan (*Welfarestate*)" *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. XIX Februari-Mei 2013.
- Setiawan, Adam dan Nehru Asyikin. "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol . 32, No. 1 Februari 2020.
- Sumeleh, Elisa J.B., "Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", *Lex Administratum*, Vol. 5 No. 9, November 2017.
- Wiku Aji, Mas Toha, Umi Rozah Aditya, dan Purwoto, "Analisis Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No:174/Pid.B/2009/Pn.Pwt)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2017.

Zulkarnaen, Zainal Asikin, dan Amiruddin, “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, *JESS (Journal of Education on Social Science)*, Vol. 4 No. 1 April 2020.

D. Internet

Andi Saputra, “Ahli Sambut Putusan MK soal UU Ciptaker: Ini Kemenangan Besar” dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-5826834/ahli-sambut-putusan-mk-soal-uu-ciptaker-ini-kemenangan-besar> tanggal 14 Maret 2022.

Antara News, “Putusan MK Tidak Membatalkan UU Cipta Kerja”, <https://www.antaranews.com/berita/2550785/baleg-dpr-tegaskan-uu-cipta-kerja-masih-berlaku-sampai-dua-tahun>, diakses pada tanggal 13 Maret 2022.

Armono, Yudhi Widyono, “Korupsi Karena Penyalahgunaan Wewenang” diakses melalui <http://ejournal.unsa.ac.id/index.php/prosedingunsa/article/view/81> pada tanggal 05 April 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/ Jabatan”, diakses melalui <https://www.kpk.go.id/id/statistik/pengindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>, pada tanggal 03 April 2022.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “MK : Inkonstitusional Besyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, diakses pada tanggal 13 Maret 2022.

Masjid Kampus UGM, “Ceramah Tarawih ke 6 Ramadan” diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=1u4kyMM-KfQ&t=2169s>, pada tanggal 8 Maret 2022.

Masjid Kampus UGM, Ceramah Tarawih ke 5 Romadhan diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=ERQq3Z-Q-_E, pada tanggal 8 April 2022.